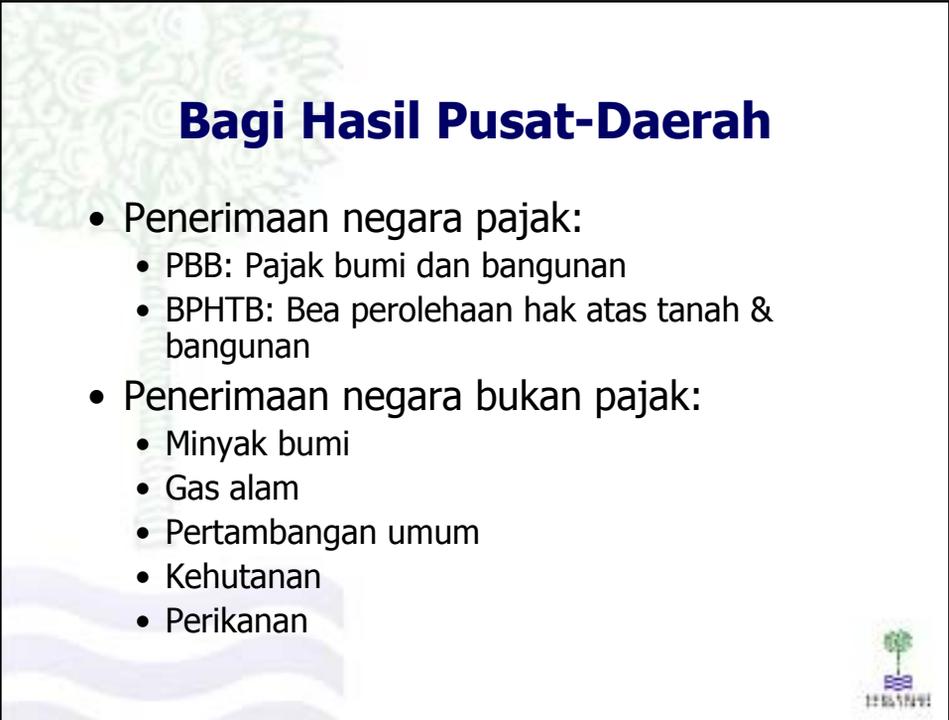




Sistem Bagi Hasil dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan



Bagi Hasil Pusat-Daerah

- Penerimaan negara pajak:
 - PBB: Pajak bumi dan bangunan
 - BPHTB: Bea perolehaan hak atas tanah & bangunan
- Penerimaan negara bukan pajak:
 - Minyak bumi
 - Gas alam
 - Pertambangan umum
 - Kehutanan
 - Perikanan



Bagaimana menghitungnya

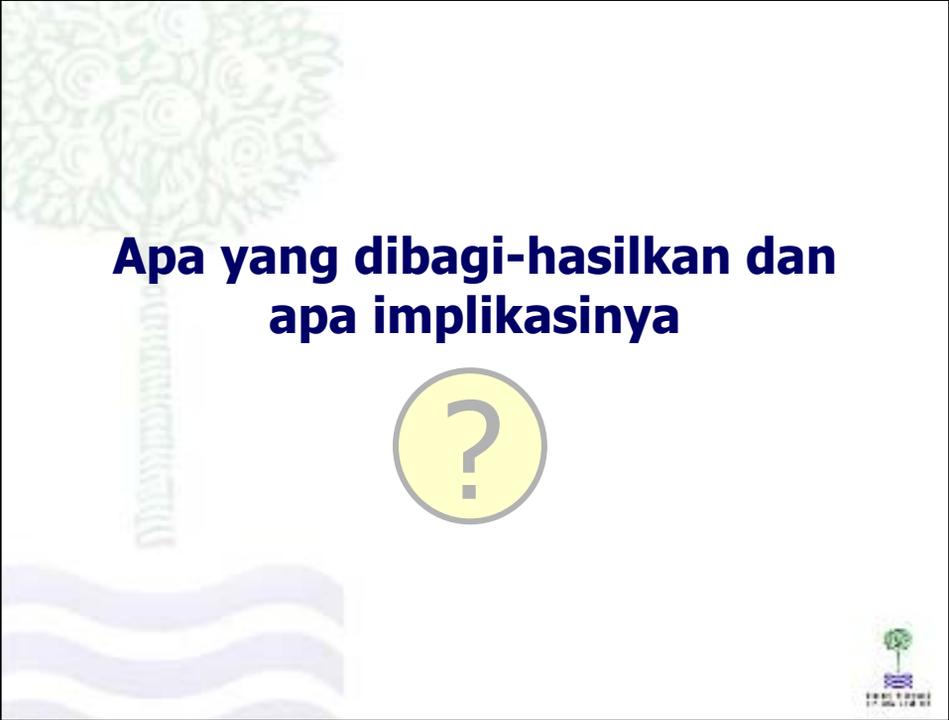
- Dijelaskan dalam PP104/00.
- Pembagian antara pusat, propinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil, kabupaten/kota lain di propinsi penghasil dan kabupaten lainnya.
- Disetor ke pusat, dikembalikan 3 bulan kemudian.



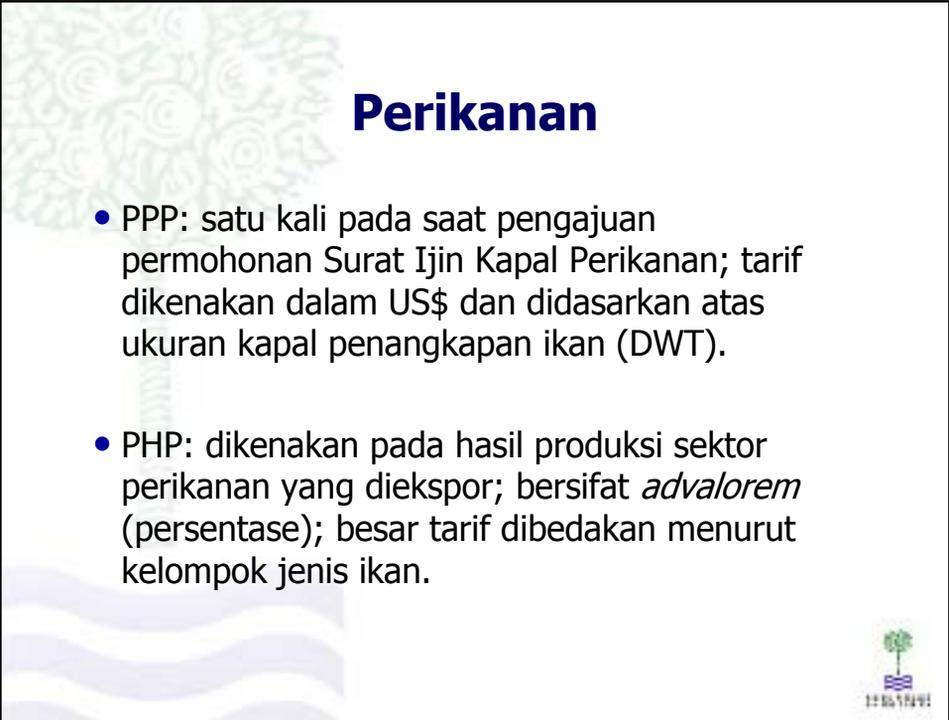
Bagi Hasil SDA (PP104/00)

No.	Penerimaan	Pusat	Propinsi penghasil	Kabupaten/ Kota Penghasil	Kabupaten/ Kota lainnya dalam propinsi (total)	Kabupaten/ Kota lainnya di seluruh Indonesia (total)
A	Migas					
1	<i>Minyak bumi</i>	85%	3%	6%	6%	-
2	<i>Gas alam</i>	70%	6%	12%	12%	-
B	Non-migas					
1	Pertambangan					
	- Sewa tanah (Land rent)	20%	16%	64%	-	-
	- Royalti	20%	16%	32%	32%	-
2	Kehutanan					
	- PSDH	20%	16%	32%	32%	-
	- IHPH	20%	16%	64%	-	-
	- Dana Reboisasi	60%	-	40%	-	-
3	<i>Perikanan</i>	20%	-	-	-	80%





Apa yang dibagi-hasilkan dan apa implikasinya

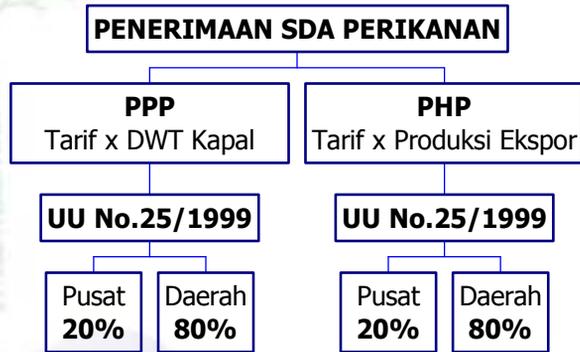


Perikanan

- PPP: satu kali pada saat pengajuan permohonan Surat Ijin Kapal Perikanan; tarif dikenakan dalam US\$ dan didasarkan atas ukuran kapal penangkapan ikan (DWT).
- PHP: dikenakan pada hasil produksi sektor perikanan yang diekspor; bersifat *advalorem* (persentase); besar tarif dibedakan menurut kelompok jenis ikan.



Mekanisme BHSDA Perikanan



Permasalahan

- Mengingat tidak adanya insentif khusus untuk daerah penghasil, tidak jelas apakah ada insentif agar daerah penghasil memelihara habitat perikananannya.
- PHP kemungkinan tidak efektif. Banyak transaksi di atas kapal plus pencurian ikan.

Permasalahan umum bagi hasil sumber daya alam

- Cara penarikan pungutan
- Besar pungutan
- Efektifitas pengumpulan pungutan
- Audit/akses terhadap data jumlah dan biaya produksi
- Konflik lokasi sumber daya alam
- Manipulasi jenis, kualitas dan kuantitas produksi sumber daya alam



Yang diperlukan daerah

- Mekanisme audit jumlah dan biaya produksi hasil SDA oleh auditor yang kredibel.
- Mekanisme resolusi konflik perhitungan alokasi bagi hasil SDA.
- Distribusi penerimaan secara langsung pada saat penyetoran.





Bagi hasil sumber daya alam:



Kenali dengan baik apa yang akan didapat. Jika tidak, habis kekayaan alam tanpa peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkesinambungan



Beberapa Catatan Tambahan



#1: Metoda perhitungan pendapatan SDA

- Yang didistribusikan sebagai pendapatan adalah rente ekonomi
- Rente ekonomi:
 - Merupakan hak pemilik SDA karena pemberian Tuhan.
 - Ada karena SDA tidak diproduksi oleh manusia.
 - Dihitung sebagai residual setelah 'semua biaya yang diperlukan' (termasuk biaya bunga modal) untuk eksploitasinya sudah dibayarkan.
 - Untuk keperluan praktis, dihitung sebagai 'excess profit' atau kelebihan keuntungan di atas 'normal profit.'
 - Normal profit = tingkat keuntungan yang membuat investor bersedia melakukan investasi. Secara teoritis dan praktis ditentukan 'sedikit' (marginally) lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman/deposito 6 bulan.



(lanjutan)

- Rumus umum perhitungan rente ekonomi per unit barang primer SDA yang diproduksi:
 - 1. Harga = p
 - 2. Biaya (tidak termasuk biaya modal) = c
 - 3. Normal profit (biaya modal + keuntungan marginal) = n
 - 4. Rente Ekonomi (RE) = $p - c - n$
- Menurut UU 25/99, RE milik pusat dan dialokasikan kembali ke daerah dengan berbagai rumusan.
- UU 25/99 memperlakukan Dana Reboisasi (DR) sebagai pendapatan dan menjadi sumber dana alokasi khusus.
- PP tentang PSDH memperlakukan DR sebagai biaya yang berarti mengurangi besarnya rente ekonomi.



#2: Penentuan lokasi SDA dan pihak yang berhak atas pendapatannya

1. Operasi utilisasi lintas batas
2. Yurisdiksi wilayah administratif dan kepemilikan SDA di laut

Kabupaten = 4 miles

Propinsi = $4 < x < 12$ miles

Nasional = > 12 miles



#3: Transparansi perhitungan pengumpulan dan realokasi

1. Perhitungan
 - Apakah rumus perhitungan tersedia dan cukup jelas
 - Siapa yang mengaudit hasil produksi
 - Siapa yang menentukan data biaya bisa dipercaya
 - Siapa dan bagaimana menentukan tingkat 'keuntungan normal'
2. Pengumpulan
 - kemana disetor (nomor account as public information)
 - aliran dana
3. Realokasi
 - Dapatkah hasilnya di cross checked dan digugat
 - Bagaimana prosedurnya



#4: Mekanisme Pengumpulan dan Realokasi

1. UU 25/1999: di setor ke pusat dan dikembalikan ke daerah
2. Pemikiran yang ada dalam RPP:
 - Disetorkan langsung ke account pusat oleh perusahaan
 - Dikembalikan ke PEMDA setiap 3 bulan
3. Skenario alternatif:
 - a. Tujuan: - efisiensi dalam manajemen anggaran
- mendukung transparansi
 - b. Cara: Setorkan dan distribusikan langsung menurut aturan yang sudah disepakati
Perusahaan membayar X → Bank mendistribusikan secara langsung:
 X_1 ke account milik Kabupaten
 X_2 ke account milik Propinsi
 X_3 ke account milik Pusat



#5: Penyelesaian Sengketa

- Lembaga mana yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik?
- Siapa yang perlu dilibatkan dalam proses?
- Bagaimana prosedurnya?



#6: Kesulitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perhitungan bagi hasil

1. Kesulitan mendapatkan data penerimaan pemerintah yang sebenarnya dari suatu sumber daya alam:
 - Tidak adanya peraturan yang seragam untuk semua perusahaan sumber daya alam.
 - Untuk kasus minyak bumi dan gas alam tidak jelas bagaimana perhitungan NOI.
 - Penerimaan dari sumber daya sering kali dikumpulkan berdasarkan letak kantor perusahaan, bukan lokasi eksploitasi.
 - Penentuan lokasi dimana sumber daya alam dieksploitasi kadang kala sulit ditentukan.



(lanjutan)

2. Kesulitan mengaplikasikan formula:
 - Untuk dapat mengaplikasikan formula dibutuhkan pengetahuan yang detail mengenai jenis penerimaan yang akan dikenakan formula.
 - Cara penarikan dan tarif iuran tidak seragam.
3. Kesulitan mendapatkan data publik lainnya yang transparan dan berkualitas baik:
 - Data-data yang ada tidak bisa dicek validitas maupun reliabilitasnya.
 - Jalur administrasi setoran penerimaan sumber daya alam cukup panjang dan tidak/belum transparan.



Dimensi Keberlanjutan

- Permasalahan kepemilikan bersama
- Perlunya alokasi yang efisien
- Peranan kebijakan publik untuk efisiensi dan pengelolaan yang berkelanjutan



Kepemilikan Bersama

- Gratis
- Tidak ada pasar
- Dimiliki banyak orang
- Tersedia cukup banyak
- Tidak mengikuti hukum kepemilikan
- Siapa cepat dia dapat
- Mengambil sebanyak-banyaknya



Perlunya Alokasi yang Efisien

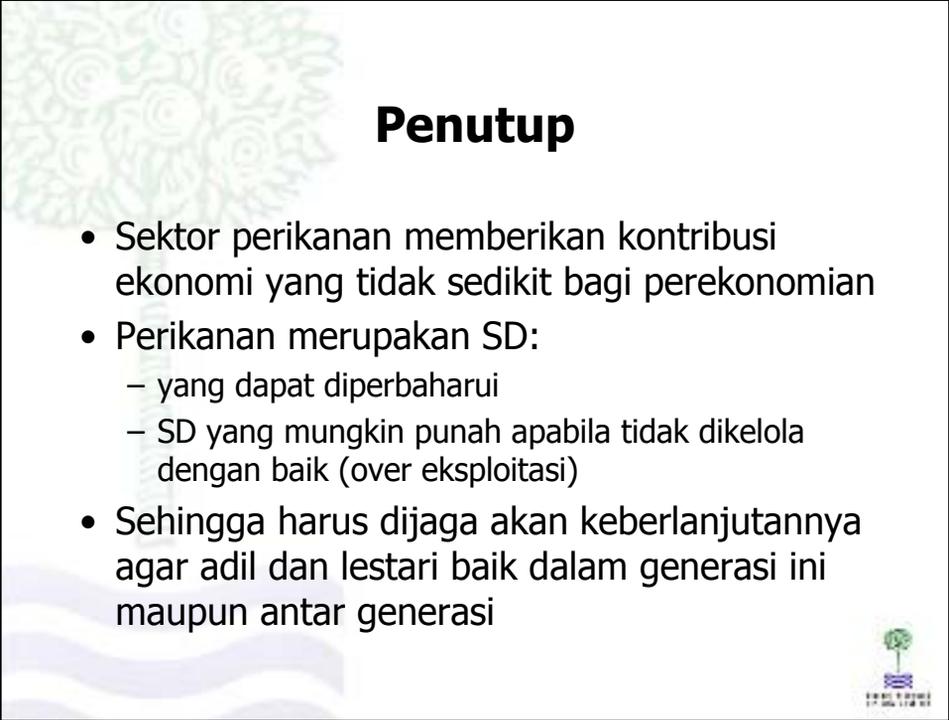
- Perlu memperhatikan:
 - Dimensi biologi ikan
 - Keseimbangan alami
 - Daya dukung
 - *Maximum Sustainable Yield* (MSY)
 - Upaya penangkapan masing-masing individu (nelayan)



Kebijakan Sumber Daya

- Memperhatikan alokasi pasar
- Perlu
 - kerja sama antar individu
 - ketersediaan data
 - pembatasan penangkapan
 - penerapan insentif dan disinsentif ekonomi
 - pengawasan bersama





Penutup

- Sektor perikanan memberikan kontribusi ekonomi yang tidak sedikit bagi perekonomian
- Perikanan merupakan SD:
 - yang dapat diperbaharui
 - SD yang mungkin punah apabila tidak dikelola dengan baik (over eksploitasi)
- Sehingga harus dijaga akan keberlanjutannya agar adil dan lestari baik dalam generasi ini maupun antar generasi

